

Eskalasi Konflik Wahabi dengan Masyarakat Lokal di Mamben Daya, Lombok Timur

Escalation of Wahabi Conflict with Local Communities in Mamben Daya, East Lombok

Saipul Hamdi^{1*}, Hafizah Awalia², I Dewa Made Satya Parama³

Departemen Sosiologi Universitas Mataram

Sukarman Sukarman⁴

Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) Mataram

Palahuddin Palahuddin⁵

Universitas Muhammadiyah Mataram

*Penulis Korespondensi: shamdi@unram.ac.id

ABSTRACT Conflicts between Wahabi adherents and indigenous peoples have existed in Lombok since the Wahabi arrived in the 1990s. The conflict between the two stems from differing interpretations of scriptural texts pertaining to worship rituals and ritual stances derived from non-scriptural sources, which have an impact on the rupture of social connections between them. As a result, when both push their different understandings and interpretations on groups outside of them, segregation, conflict, and social violence frequently arise. This article examines the struggle in East Lombok between Wahabi and local people, which was accompanied by acts of violence such as the burning of mosques and Wahabi offices. Specifically, this research aims to understand the origins of the conflict, the escalation of the conflict, and the actors involved in the conflict. This study was carried out during a four-month period (April-August 2023) utilizing qualitative approaches. According to the findings, the dispute began with the construction of the Wahabi mosque in Mamben Daya hamlet, which lacked socialization and so faced rejection and resistance. Because the two camps were unable to reach an agreement on the continuing of the As-Syafi'i mosque construction permission, the people of Mamben Daya village, particularly religious leaders, staged a peaceful protest at the Wahabi mosque construction site and the village head's office. This action did not result in bloodshed, but the controversy erupted during negotiations to halt the construction of the As-Syafi'i mosque after video tapes showing Wahabi leaders denigrating the hallowed graves of Lombok's saints were disseminated. The dispute erupted after the As-Syafi'i mosque and the As-Sunnah headquarters were silently burned. Another discovery is the involvement of religious leaders and other social elites in the region's Wahabi dispute. The local government mediated reconciliation, which resulted in a peace deal and the purchase of the burned-down Wahabi mosque's grounds.

ABSTRAK Konflik antara anggota Wahabi dengan masyarakat lokal telah lama terjadi sejak kehadiran Wahabi 1990an di Lombok. Konflik antara keduanya muncul karena perbedaan penafsiran teks kitab suci terkait praktik ibadah dan posisi ritual yang bersumber dari non-kitab suci, yang berdampak pada ketergangguan relasi sosial di antara mereka. Akibatnya, segregasi, konflik, dan kekerasan sosial seringkali terjadi ketika keduanya memaksakan pemahaman dan penafsiran masing-masing untuk dipraktikkan oleh kelompok di luar mereka. Artikel ini membahas tentang konflik antara Wahabi dengan masyarakat lokal di Lombok Timur yang disertai aksi kekerasan berupa pembakaran masjid dan markas Wahabi. Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk memahami awal mula konflik, eskalasi konflik, dan aktor-aktor yang terlibat pada konflik tersebut. Penelitian ini dilakukan selama empat bulan (April-Agustus 2023) dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, konflik berawal dari pembangunan masjid Wahabi di desa Mamben Daya yang kurang sosialisasi sehingga mengalami penolakan dan resistensi. Dikarenakan kedua kubu tidak menemukan kesepakatan terkait keberlanjutan izin pembangunan masjid As-Syafi'i, maka masyarakat desa Mamben Daya terutama dari unsur tokoh-tokoh agama melakukan aksi damai ke lokasi pembangunan masjid Wahabi dan kantor kepala desa. Aksi ini tidak menimbulkan kekerasan, tetapi di tengah negosiasi penghentian pembangunan masjid As-Syafi'i, konflik mengalami eskalasi pasca tersebar potongan video berisi ceramah oleh tokoh Wahabi yang menghina makam suci para wali di Lombok. Eskalasi konflik muncuat ketika aksi senyap dengan membakar bangunan masjid As-Syafi'i dan markas As-Sunnah. Temuan lain adalah keterlibatan tokoh agama dan elit-elit sosial lainnya dalam pusaran konflik Wahabi di wilayah ini. Rekonsiliasi yang dimediasi oleh pemerintah daerah berhasil meredam konflik dengan cara membuat perjanjian damai dan membeli tanah masjid Wahabi yang dibakar.

KEYWORDS Attack; Escalation; Violence; Saint's Grave; Wahabi; Lombok

KATA KUNCI Konflik; Eskalasi; Kekerasan; Makam Wali; Wahabi; Lombok

PENGANTAR

Islam di Lombok semakin menunjukkan identitas yang plural dengan hadirnya kelompok-kelompok Islam transnasional seperti Wahabi, Jamaah Tabligh, Ahmadiyah, Hizbut Tahrir, Ikhawanul Muslim, dan kelompok tarekat seperti Naqsabadandiyah, Qadiriyyah, dan Jistiyah (Marrison, 1997; Ridho, 2017; Zuhdi, 2018). Kehadiran mereka pada dasarnya cukup diterima oleh masyarakat Sasak (sebutan untuk suku asli yang tinggal di pulau Lombok), bahkan yang menjadi tokoh di gerakan tersebut adalah Orang Sasak asli yang sebagian besar belajar Islam di Timur Tengah dan pulanginya berkiprah sebagai *tuan guru* (Kingsley & Law School, 2010; Suprpto, 2015). Pada saat yang bersamaan bahwa tidak semua ajaran yang terdapat di Ormas atau gerakan Islam transnasional tersebut cocok dan sesuai dengan praktik budaya dan tradisi islam yang berkembang di masyarakat lokal, sebaliknya banyak yang berbeda sehingga seringkali menimbulkan gesekan, perselisihan, dan konflik di tengah masyarakat. Data di lapangan menunjukkan bahwa kelompok Islam transnasional mengalami konflik dan kekerasan dengan masyarakat lokal Sasak termasuk konflik Ahmadiyah (1998, 2000, dan 2022), konflik Wahabi (2022), dan Jamaah Tabligh (1980an, 2020) (Alfandi, 2013; Aqil, 2020).

Artikel ini akan membahas tentang konflik Wahabi dengan masyarakat lokal di desa Mamben, Lombok Timur. Konflik ini sangat kompleks karena tidak hanya melibatkan satu unsur, tetapi banyak unsur sehingga harus diurai secara detail persoalan-persoalan yang menyebabkan pembakaran masjid As-Syafi'i dan markas

As-Sunnah. Kelompok Wahabi di Lombok biasanya disebut As-Sunnah dan Salafi. Pendirian masjid Wahabi di desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur mendapat tantangan dan penolakan dari masyarakat lokal. Meskipun pihak desa telah memberi izin atas pendirian masjid tersebut, tetapi sebagian warga yang berseberangan dengan ideologi dan mazhab Assunnah sangat keberatan dengan kehadiran masjid baru ini di lingkungan desa mereka. Mereka khawatir ajaran Wahabi dapat memengaruhi masyarakat Mamben dan menimbulkan perpecahan dan segregasi sosial karena masjid-masjid seringkali digunakan oleh Wahabi untuk menyerang praktik lokal yang berkembang di masyarakat. Warga kemudian mendemo kepala desa untuk menghentikan dan mencabut izin pembangunan masjid dan mengancam untuk menggulingkan kepada desa jika tuntutan mereka tidak diterima. Setelah menghadapi demo besar di kantor desa, maka pihak kepala desa berkomitmen untuk mencabut izin dan menghentikan proses pembangunan masjid As-Syafi'i.

Meskipun pembangunan tidak lagi dilanjutkan, tetapi penyerangan terjadi setelah muncul persoalan baru, yaitu beredarnya potongan video tokoh Wahabi yang menghina makam wali-wali di Lombok yang disamakan dengan makam "kotoran anjing". Potongan video tersebut viral dan menyulut amarah warga Lombok, baik di Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Akibatnya, markas Assunnah di Bageknyaka dibakar pada jam 02:00 PM, begitu juga masjid Imam As-Syafi'i di Mamben akhirnya ikut dibakar pada rentang

waktu yang tidak jauh jaraknya. Rentetan demonstrasi di kantor Gubernur NTB, kantor Polda NTB, dan kantor Bupati Lombok Timur menuntut pembubaran kelompok Wahabi dan aktivitas sosial pendidikan dan keagamaan mereka di seluruh Lombok mengarahkan artikel ini untuk menginvestigasi awal mula penyerangan masjid As-Syafi'i dan markas Assunah Wahabi, dan pengaruh beredarnya video penghinaan makam wali terhadap eskalasi konflik dan kekerasan yang dihadapi oleh kelompok Wahabi.

Peristiwa penyerangan di atas memperlihatkan adanya unsur-unsur eksternal terutama unsur politik lokal yang terlibat dalam pusaran konflik dan kekerasan yang menimpa kelompok Wahabi ini. Persaingan antara kepala desa dalam pemilihan kepada desa sebelumnya telah menyeret komunitas Wahabi dalam pusaran konflik. Wahabi merasa ditinggalkan oleh pihak kepala desa padahal sebelumnya dialah yang mendorong pembangunan masjid As-Syafi'i. Pada saat yang bersamaan, mantan calon kepala desa yang kalah ikut serta dalam demonstrasi tidak hanya menuntut penghentian masjid, mereka juga menuntut pengusutan kasus korupsi di kantor kepala desa. Melihat pelebaran kasus dan aktor yang terlibat terdiri ratusan orang maka penelitian ini bertujuan untuk melihat peran tokoh agama dan politik dalam pusaran konflik Wahabi dengan masyarakat lokal dan upaya rekonsiliasi oleh pemerintah terhadap kelompok-kelompok yang terlibat.

Riset tentang konflik dan kekerasan antara Wahabi dengan masyarakat dan organisasi lokal tradisional telah banyak dilakukan. Hasilnya menunjukkan bahwa

konflik yang terjadi lebih bersifat ideologis dan perbedaan doktrin keagamaan dalam menilai praktik-praktik budaya dan tradisi lokal yang berkembang di masyarakat yang dinilai keluar dari Islam (Hamdi et al., 2021; Muhtadi, 2015; Nashir, 2008). Ajaran Wahabi juga disinyalir dekat dengan takfirisme dan radikalisme, bahkan Wahabi diklaim sebagai pintu masuk menjadi radikal dan teroris (Aritonang, 2020; Fatmawaton, 2019; Madali, 2015; Sahrasad et al., 2020). Kurangnya pengembangan wacana Pancasila, demokrasi dan partisipasi mereka dalam acara kebangsaan melahirkan *image* negatif tentang kelompok Wahabi di masyarakat. Apalagi mereka fokus pada materi dakwah yang menyerang kearifan lokal sehingga konflik terus mengalami reproduksi dan eskalasi (Abdullah, 2022; Alsaif, 2013; Anwar, 2016; Muhtadi, 2015; Said, 2019). Riset ini sedikit berbeda dengan riset-riset sebelumnya karena secara spesifik membahas eskalasi konflik antara Wahabi dengan masyarakat lokal pasca pembakaran Masjid As-Syafi'i dan Markaz As-Sunnah di Lombok Timur. Keterlibatan tokoh agama, tokoh politik dan kelompok adat dalam pusaran konflik Wahabi menjadi novelti dalam penelitian ini.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi-partisipasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Peneliti langsung ke lapangan dan mengikuti aktivitas-aktivitas sosial dan keagamaan kelompok yang terlibat di dalam konflik, baik dari pihak Wahabi maupun dari kelompok yang

kontra. Informan dalam penelitian ini cukup beragam mulai dari tokoh Wahabi, tokoh masyarakat, kelompok adat, para *tuan guru*, kelompok pemuda, dan pemerintah daerah. Lokasi penelitian di desa Mamaben Daya dan markaz As-Sunnah. Penelitian berlangsung selama lima bulan sejak April-Agustus 2023.

PEMBAHASAN

Penyerangan Masjid As-Syafi'i di desa Mamben Daya, Lombok Timur

Kelompok Islam transnasional Wahabi terus menunjukkan perkembangan pesat di berbagai negara pasca Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah menyponsori gerakan ini melalui berbagai program *chariti* di yayasan-yayasan pendidikan dan dakwah yang mengembangkan ideologi dan ajaran ini. Melalui jejaring alumni Timur Tengah yang pulang kembali membangun daerah mereka mengembangkan pendidikan keagamaan, dan juga pembangunan lembaga pendidikan oleh Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah di berbagai negara menempatkan aliran Wahabi sebagai alternatif yang mampu menjawab krisis keagamaan yang terjadi di masyarakat. Yayasan-yayasan pendidikan beraliran Wahabi berhasil menarik simpati tidak hanya kaum tua, tetapi juga anak-anak muda untuk berhijrah (kembali ke ajaran murni Rasulullah). Meskipun pada kenyataannya di lapangan, mereka banyak mengalami tantangan dan resistensi dari masyarakat karena memilih jalan yang berlawanan dengan arus budaya dan tradisi yang telah lama berkembang.

Kelompok Wahabi telah menjadi sorotan dunia pasca peristiwa 11 September 2001. Pembajakan pesawat komersial yang kemudian

diledakkan di Gedung WTC dan gedung militer Pentagon meyeret nama Wahabi karena Osama Bin Laden otak pengeboman dinilai terinspirasi oleh ajaran Wahabi. Doktrin Wahabi yang menekankan pada pemberlakuan syariat Islam dan kebolehan jihad melawan musuh-musuh Islam melekat pada sosok Osama bin Laden yang juga keturunan pengusaha Arab Saudi (Moussalli, 2009; Oliver, 2002). Haneef James Oliver (2002) menyatakan ketidaksetujuannya tentang pengaitan doktrin Wahabi atas tindakan radikal sekelompok orang termasuk di dalamnya bin Laden. Menurut Oliver penyeretan nama Wahabi dalam pusaran kekerasan dan tindakan teror hanyalah “mitos” yang dikembangkan oleh media. Kesalahan persepsi dari peneliti dan media ini membuat Oliver kebingungan mengingat Bin Laden bukan mewakili Wahabi, dia lebih ke Ikhwanul Muslimin (Oliver, 2002).

Meskipun berdampak negatif atas kasus 9/11 terhadap perkembangan dakwah Wahabi, di mana banyak yang mempertanyakan kembali apakah ajaran Wahabi mengajarkan aksi jihadisme dan terorisme, tetapi pada sisi yang lain Wahabi terus berkembang pesat dan berhasil membuktikan ajarannya tidak mengandung unsur kekerasan dan jihad yang keliru (Barkley, 2012). Jihad yang diajarkan oleh Wahabi berbeda dengan jihad yang selama ini berkembang dalam ajaran ISIS, Jamaah Isamiyah dan Al-Qaeda (Benthall, 2016; Enjavinezhad & Paramasivam, 2020; Muhyidin et al., 2022). Oleh karena itu, para peneliti Barat membagi kelompok Salafi sendiri ke beberapa bagian yaitu Salafi purist-*quities*, Salafi Haroki, dan Salafi Jihadis. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas lembaga pendidikan dan Yayasan

di bawah ideologi Wahabi tergolong Salafi purist-Quities, mereka tidak bersentuhan langsung dengan dunia politik tetapi murni pada dakwah dan pengembangan lembaga pendidikan Islam (Hogarth, 1925; Moussalli, 2009; Sahrasad et al., 2020; Williams, 2017).

Pasca reformasi 1998, kelompok Wahabi di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Lombok terus menunjukkan geliat kemajuan dakwah yang signifikan. Tokoh-tokoh Wahabi muncul di berbagai forum pengajian di masjid-masjid membawa ulama-ulama besar dari Arab Saudi. Kehadiran ulama dari Saudi Arabia menarik hati dan simpati masyarakat. Selain itu, tokoh-tokoh Wahabi sangat aktif berdakwah dengan platform online menggunakan media sosial YouTube, Facebook, IG dan WAGrup. Lombok termasuk salah satu pusat gerakan dakwah Wahabi di Indonesia. Tokoh-tokoh Wahabi dari Lombok seringkali tampil di platform online termasuk di channel YouTube menyampaikan ceramah, kajian dan dialog keagamaan. Pada saat yang bersamaan Lombok yang sangat terbuka dengan bermacam aliran yang berkembang termasuk organisasi lokal, nasional, dan transnasional telah menempatkan Wahabi pada ruang kontestasi dan persaingan ketat dengan kelompok-kelompok Islam lainnya tersebut.

Seperti yang telah saya singgung di atas bahwa gerakan Wahabisme di Lombok tidak hanya bersaing dengan gerakan Islam transnasional lainnya seperti Jamaah Tabligh, Ikhawanul Muslimin dan Ahmadiyah, tetapi juga bersaing dengan gerakan Islam lokal seperti Nahdlatul Wathan (NW), Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), Nahdatlul Ulama (NU), Maraqit Ta'limat dan Mukhtariah

untuk meraih simpati masyarakat bergabung ke dakwah dan forum *halaqah* mereka (Hamdi et al., 2021; Said, 2019). Meskipun metode dan pendekatan dakwah Wahabi tidak “populer” dan seringkali menimbulkan kontroversi di masyarakat, tetapi lambat laun sebagian masyarakat mulai memahami dan menerima dakwah Wahabi. Pendekatan purifitis, dan anti “*bidah*” dalam dakwah Wahabi yang menyerang praktik keagamaan Islam lokal seperti perayaan maulid, ziarah makam wali, ziarah ke tempat-tempat sakral “*kemaliq*”, dan tempat pengobatan di makam keramat seringkali menimbulkan konflik dan berujung kekerasan sosial antara Wahabi dengan masyarakat lokal. Dikarenakan terkesan memaksakan kehendak dan mengancam praktik lokal, maka telah menempatkan kelompok Wahabi menjadi musuh bersama masyarakat local (Fatmawatun, 2019; Kusumah, 2020).

Perbedaan dalam praktik ibadah terutama dalam konteks ruang *khilafiyah fikhiyah* antara Wahabi dengan masyarakat lokal mendorong kelompok Wahabi keluar dari komunitas, dan cenderung mengisolasi diri dengan membangun masjid-masjid di berbagai desa (Fatmawatun, 2019; Ridwan, 2021). Menurut anggota Wahabi, mereka tidak nyaman shalat bersama dengan kelompok di luar mereka karena meyakini adanya unsur-unsur penting yang “ditambah” dan “dikurangi” oleh imam di dalam praktik shalat tersebut. Akhirnya, Wahabi merasa sangat penting untuk membangun masjid sendiri supaya dapat beribadah dengan khusyu', tenang dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad. Salah satu anggota Wahabi yang bekerja di Markas Assunnah menyatakan,

“kami biasanya shalat di masjid yang terdapat di markaz jika tidak ada masjid Wahabi di kampung anggota kami (Wawancara 8 April 2023). Kami merasa lebih nyaman karena sesuai dengan tata cara shalat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, maka bagi teman-teman yang agak jauh dari markaz diupayakan membangun masjid di kampung mereka”. Jadi, pembangunan masjid tidak semata-mata memisahkan atau menjauhkan diri dari “masjid” masyarakat secara luas, tetapi mereka mencari kenyamanan, ketenangan, dan kekhusyuan akibat penafsiran yang berbeda terhadap teks suci yang mengajarkan tata cara shalat.

Pembangunan masjid baru yang khusus buat anggota Wahabi dapat menjadi solusi di tengah perbedaan yang mengakibatkan gesekan di masjid masyarakat. Sulit untuk menyatukan mereka karena adanya pemahaman yang berbeda dalam praktik shalat dan ritual lainnya yang berujung pada klaim sah atau tidak sahnya shalat itu (Asif, 2018; Madali, 2020). Tokoh-tokoh Wahabi kemudian bergerak cepat membangun masjid-masjid di kampung, di desa, di perumahan sebagai tempat jamaah mereka shalat dan berkumpul meskipun tidak banyak anggota yang tinggal di sana. Mereka membeli tanah warga, bergotong royong dan bekerja sama mengeluarkan uang secara *swadaya* untuk pembangunan dan pembebasan tanah tersebut. Akan tetapi, data lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar biaya pembangunan masjid disponsori oleh lembaga donor dari Timur Tengah, sedangkan Wahabi hanya menyediakan lahannya saja. Bantuan inilah yang membuat sebagian bangunan masjid-masjid Asunnah

kelihatan lebih bagus, megah, dan lebih bersih (Hamdi, 2019; Said, 2019).

Maraknya pembangunan masjid di bawah bendera Wahabi melahirkan respon yang beragam di masyarakat. Sebagian masyarakat menerima, dan sebagian menolak pembangunan masjid Wahabi karena dianggap memisahkan diri dari “masjid” masyarakat yang telah lama berdiri dan dicurigai adanya agenda tersembunyi yang ingin memengaruhi dan memecah belah masyarakat. Mereka yang tidak setuju berupaya menggagalkan proses pembangunan, bahkan berupaya merusak dan membakar masjid tersebut. Aksi penolakan dan pembakaran masjid dilakukan karena berbagai faktor termasuk adanya indikasi segregasi sosial yang akan dilakukan oleh jamaah Wahabi dengan masyarakat. Isi ceramah yang seringkali menyudutkan dan membidahkan praktik ibadah lokal masyarakat seperti *tahlilan*, dan juga tidak ada komunikasi dan izin dari tokoh agama dan masyarakat di luar Wahabi.

Artikel ini fokus pada peristiwa penyerangan masjid Wahabi yakni Masjid Imam As-Syafi'i di Mamben Daya dan Markaz As-sunnah di Bageknyaka Lombok Timur. Penyerangan dan pembakaran masjid Wahabi menjadi fenomena sosial di berbagai desa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia pembangunan masjid Wahabi juga mengalami penolakan seperti pembangunan masjid Imam Ahmad bin Hambal milik Wahabi di Bogor. Di Lombok sendiri beberapa masjid Wahabi yang pernah dibakar adalah masjid Wahabi di Kabar, Sakra Barat, Masjid Wahabi di Pringgasele, Masjid Wahabi di Masbagik, Masjid Wahabi

di Kota Raja, dan Masjid Wahabi di Suralaga (Hamdi, 2019). Pembakaran ini pada umumnya diakibatkan karena ketidaksukaan masyarakat terhadap perilaku keagamaan Wahabi yang menyerang dan mengklaim sebagai kelompok yang paling benar praktik Islamnya.

Penolakan pembangunan Masjid Imam As-Syafi'i di Mamben Daya terjadi setelah kepala desa memberi izin untuk melanjutkan pembangunan tersebut. Masjid Wahabi telah lama direncanakan untuk dibangun sebagai bagian dari syiar dakwah di daerah tersebut. Tanah lahan masjid dibeli oleh pihak Yayasan Assunah dari salah satu warga desa Mamben Daya. Pembangunannya mulai dilakukan di akhir tahun 2021 setelah memperoleh izin tanda tangan dari tetangga yang tinggal di sekitar kompleks Masjid Assyafi'i. Menurut Sekretaris desa Maben Daya, awalnya panitia pembangunan masjid datang ke pihak desa untuk meminta izin pembangunan masjid, tetapi berkas mereka dikembalikan untuk dilengkapi terutama izin dan tanda tangan dari pihak warga yang tinggal di sekitar masjid. Setelah memperoleh tanda tangan dari tetangga di kompleks pembangunan masjid maka pihak desa kemudian menandatangani izin pembangunan masjiditu.

"Tidak ada alasan kami dari pihak desa menolak pembangunan tersebut setelah panitia mendapat persetujuan dari tetangga di sekitar masjid", kata Sekdes Mamben Daya (Wawancara 6 Mei 2023).

Aktivitas pembangunan masjid terus dilanjutkan meskipun masyarakat mulai menolak surat izin dari pihak desa. Pembina majelis taklim Darunnajah Al-Irsyadi pimpinan Ustaz Ahmad Asdaruddin

menyatakan, "kelompok Wahabi melakukan pembohongan publik, belum ada izin IMB dari pihak pemerintah daerah, pembangunan mereka sudah berjalan". Pihak Wahabi juga melanggar Peraturan Bersama Menteri (PBM) nomor 8 dan 9 tahun 2006 terkait aturan pembangunan tempat ibadah. Dia juga menekankan bahwa pembohongan inilah yang menjadi perhatian masyarakat Mamben Daya termasuk dari tokoh agama dan masyarakat. Menurutnya, pihak Wahabi tidak pernah berkomunikasi dan memusyawarahkan rencana pembangunan masjid tersebut dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat di desa ini" (interview, 24 Juni 2023).

Pembangunan tempat ibadah seringkali menjadi polemik di kalangan kelompok beragama di Indonesia. Kasus-kasus yang pernah muncul misalnya pelarangan pembangunan Gereja GKI Yasmin Bogor Jawa Barat, gereja HKBP Maranatha Cilegon, Gereja di Lumajang, pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) di Malang, dan pembanguna Pura Segara di Lombok Nusa Tenggara Barat (Ludji et al., 2023; Wijayanto, 2021). Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri menjadi dasar polemik karena adanya empat syarat yang harus dipenuhi yaitu minimal jamaah 90 orang, harus ada dukungan warga sekitar 60 orang, rekomendasi FKUB dan rekomendasi dari Kemenag di berbagai daerah (Ardiansah, 2018; Debatara, 2022). Aturan ini menjadi momok yang menakutkan dan menghambat proses pembangunan tempat ibadah terutama bagi kelompok minoritas. Selain sulit mendapat izin dari warga lokal yang di luar kelompok mereka, aksi penolakan melalui demonstrasi

dan intimidasi juga seringkali terjadi (Suryawati & Syaputri, 2022).

Yang unik dalam temuan kasus riset ini adalah adanya resistensi masyarakat lokal terhadap pembangunan tempat ibadah organsiasi atau aliran keagamaan tertentu di dalam satu agama yang berbeda paham dan penafsiran. Di Lombok, pembangunan tempat ibadah aliran Ahamdiah, LDII, dan Wahabi seringkali mendapat penolakan dan penyerangan dari Ormas lain (Wahab & Fakhruddin, 2019). Alasan penyerangan karena masjid tersebut diklaim mengajarkan kesesatan dan intoleransi terhadap praktik keagamaan masyarakat lokal. Jadi, tempat ibadah tidak lagi dipandang sebagai tempat yang suci dan mengajarkan kebaikan, sebaliknya menjadi tempat buruk dan sesat yang harus dirusak. Masjid juga dimaknai sebagai tempat memecah belah umat karena memisahkan diri dengan komunitas masjid yang lain. Masjid Wahabi tentunya cenderung akan mengakomodir tokoh-tokoh mereka sebagai imam dan penceramah, begitu juga sebaliknya organisasi lokal tidak akan mengakomodir tokoh-tokoh agama yang berseberangan dengan mereka.

Pembakaran masjid Wahabi di Lombok dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan diri pembela *Ahlusunnah Wal Jamaah* yang terdiri dari anggota organisasi Nahdlatul Ulama (NU), Nahdlatul Wathan (NW), Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), Marakit Taklimat dan tokoh-tokoh adat. Di awal aksi pada 3 Desember 2023 tidak ada pembakaran sama sekali, mereka aksi secara damai ke lokasi masjid dan ke kantor pemerintah desa setelah sebelumnya tuntutan mereka tidak digubris

oleh kepala desa Mamben Daya. Koordinator aksi Asdaruddin menyatakan, kelompok Wahabi terus melakukan pembangunan, bahkan pada tahap pengecoran untuk tingkat dua. Mereka tidak peduli dengan tuntutan masyarakat yang menolak dan menuntut penghentian pembangunan masjid. Sikap inilah yang mendorong kami melakukan aksi, katanya. Ratusan massa berdemo menggunakan mobil dan berjalan kaki yang dikenal dengan aksi super damai 212 bertepatan dengan tanggal 2 Desember 2021. Nama aksi 212 ini tersinspirasi dari nama aksi nasional 212 yang dipimpin oleh Habib Rizieq ketika menuntut Ahok dipenjara dan diadili dalam kasus penistaan agama. Secara bergantian mereka berorasi menolak kehadiran Wahabi di desan Mamben Daya dan meminta menghentikan pembangunan masjid As-Syafi'i.

Setelah berorasi di sekitar masjid As Syafi'i, massa kemudian menuju kantor desa Mamben Daya. Kepala desa yang awalnya mendukung pembangunan masjid Wahabi berubah pikiran dan berbalik mendukung aksi massa yang menuntut pencabutan izin pembangunan masjid. Dengan suara yang gemetar di depan massa, kepala desa dipaksa membacakan tuntutan pendemo yang telah dikonsep sebelumnya oleh koodinator aksi. Massa menekan kepala desa dan memberikan pilihan mencabut izin pembangunan masjid atau akan dipaksa turun sebagai kepala desa. Setelah kepala desa membacakan tuntutan para pendemo, massa kemudian meninggalkan kantor kepala desa. Mereka berharap waktu yang dijanjikan oleh pihak desa membongkar sendiri bangunan masjid Wahabi dapat direalisasikan.

Di pihak kelompok Wahabi sendiri tidak tinggal diam, mereka melakukan perlawanan terhadap tuntutan massa. Karena merasa punya hak yang dilindungi undang-undang dalam kebebasan beragama, kelompok Wahabi terus bertahan dan tetap melanjutkan pembangunan secara diam-diam. Pemerintah daerah dan kepolisian berupaya untuk memediasi kedua kelompok yang berselisih pada 5 Desember 2022, akan tetapi mediasi selalu gagal karena salah satu kubu tidak hadir di acara mediasi tersebut. Para pendemo justru kecewa dengan Langkah Bupati Lombok Timur yang memberikan bantuan tiga bus kepada pihak Yayasan Assunnah setelah aksi demonstrasi yang mereka lakukan ke masjid As-Syafi'i. Asdaruddin menyatakan, dirinya dan tokoh-tokoh agama di Mamben Daya sangat kecewa dan melihat Bupati tidak netral dan lebih memihak ke Wahabi.

Puncak penyerangan terhadap masjid As-Syafi'i terjadi setelah beredar video yang berisi ceramah salah satu tokoh penting Wahabi yakni Tuan Guru Mizan Kudsiah yang menghina makam-makam suci yang dianggap keramat oleh orang-orang Sasak. Meskipun konteksnya lebih ke kritik terhadap pengkultusan pada sebuah makam sebagai tempat berdo'a, namun kata-kata "tain acong" atau berak anjing dianggap sangat menghina makam leluhur orang Sasak. Makam-makam yang disebut di ceramah tersebut adalah makam Selaparang, Sekarbela, Ali Batu, dan Batu Layar. Makam-makam tersebut merupakan napak tilas para wali ketika menyebarkan Islam sebelum kemerdekaan Indonesia. Makam-makam ini dikunjungi oleh masyarakat untuk mengingat

jasa para wali yang menyebarkan Islam dan meminta keberkahan kepada Allah di lokasi makam mereka. Potongan video ini tersebar dengan cepat lewat media sosial *WhatsApp* dan *Facebook* yang menimbulkan reaksi keras dari tokoh agama dan kelompok adat atas konten ceramah tersebut.

Peristiwa penghinaan makam para wali yang disebutkan di potongan video itu bersamaan dengan kasus penolakan masjid As-Syafi'i di Mamben Daya. Setali mata uang, kasus ini menjadi momentum bersama melawan kelompok Wahabi. Makam-makam yang dihina tidak hanya berlokasi di Lombok Timur, tetapi juga di Lombok Barat, Mataram dan Lombok bagian Selatan. Para murid dan keturunan dari wali tersebut menghubungi koordinator aski Asdaruddin untuk bersama-sama melakukan aksi yang lebih luas dari sebelumnya. Tepat pada tengah malam, 2 Januari 2022 aksi senyap terjadi oleh massa dengan cepat mereka membakar masjid Assyafi'i di Mamben Daya dan kemudian bergerak ke markaz besar Wahabi di Bageknyaka yang hanya berjarak 1 km.

Aksi ini dilakukan pada tengah malam jam 1.30 AM oleh sekitar 300-500 orang. Menurut Ahmad, salah satu tokoh pemuda Wahabi yang sedang piket menjaga masjid As-Syafi'i menyatakan, massa menyerang menggunakan ikat kepala warna putih membawa senjata tajam. Mereka berkumpul di tengah jalan di dekat lokasi masjid As-Syafi'i. Awalnya dia mengira bahwa mereka yang menggunakan ikat kepala putih itu adalah orang Bali yang sedang keliling karena Muslim Sasak tidak menggunakan ikat kepala putih. Dia kemudian mengecek dan keluar masjid menggunakan sepeda motor mendekati

massa yang berkumpul. Dia ditarik oleh beberapa orang dan diinterogasi. Untungnya dia bisa berbahasa Sasak lokal dengan logat Mamben sehingga dirinya selamat dari pembunuhan. Ketika ditarik, massa yang membawa pedang sempat mengancam untuk membunuh dan menaruh pedang di lehernya. Melihat kejadian itu dia hanya minta untuk tidak dibunuh dan menyatakan dia orang asli kampung Mamben. Karena mendengar dialek Mamben, salah satu tokoh menyelamatkannya dari amukan massa dan disuruh pulang melalui jalur alternatif ke rumahnya. Adapun teman-temannya yang berjaga sebanyak sembilan orang di masjid melarikan diri dan bersembunyi di parit-parit sawah supaya tidak kelihatan. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa, hanya terjadi pembakaran bangunan masjid dan bahan-bahan yang digunakan. Setelah pembakaran ini terjadi, massa kemudian menuju kompleks markaz pusat Wahabi yang juga Pondok Pesantren As-Sunnah tempat santri belajar. Massa bergerak cepat membakar mobil dan motor di lokasi halaman pesantren dan juga klinik Kesehatan.

Pengaruh Potongan Video dan Dampaknya terhadap Eskalasi Konflik

Saya berargumen bahwa penyerangan ke markaz As-Sunnah merupakan bagian dari eskalasi konflik antara kelompok Wahabi dengan masyarakat lokal yang terjadi sebelumnya di desa Mamben Daya. Konflik ini meluas setelah beredar potongan “video” yang menghina makam suci para leluhur dan para wali yang sangat dihormati oleh Muslim Sasak. Potongan video Tuan Guru Mizan Qudsiah, salah satu tokoh pentolan Wahabi

yang menyindir dan menghina praktik tradisi ziarah ke makam leluhur Sasak yang dilakukan setiap minggu, bulan dan tahun. Dalam video itu dia mengkritisi kepercayaan yang berkembang di masyarakat pengkultusan atas makam-makam “kramat”, dan memposisikan makam-makam itu sama dengan makam “tain acong” atau makam berak Anjing yang juga disakralkan oleh warga. Potongan video ini menimbulkan kegaduhan dan gejolak besar di masyarakat Lombok. Meskipun video ini telah lama diunggah oleh channel Youtube Surabaya Mengaji, tetapi memiliki momentum yang besar ketika diedit dan dipotong untuk disebar di tengah-tengah panasnya aksi demo pembangunan masjid As-Syfi'i di desa Mamben Daya.

Penyebutan nama-nama makam yang telah melegenda termasuk makam Selaparang, Bintaro, Sekarbela, Loang Balok, Batu Layar, dan Ali Batu memancing kemarahan masyarakat dan berdampak pada eskalasi konflik yang lebih besar. Selain menyerang dan membakar masjid Wahabi di Mamben Daya, massa kemudian menyerang markaz As-sunnah dan melakukan pembakaran terhadap fasilitas di dalamnya termasuk pondok pesantren dan klinik kesehatan. Serangan ke markaz As-sunnah dilakukan oleh orang-orang yang sama menyerang masjid As-Syafi'i dengan identitas ikat kepala (sapok) putih lengkap membawa senjata tajam. Skuriti yang menjaga markaz As-sunnah lari ketakutan menyelamatkan diri karena kalah jauh dari jumlah massa yang menyerang diperkirakan antara 300-500 orang. Mobil-mobil dari arah Timur dan Barat dihentikan sementara ketika aksi penyerangan mereka berlangsung. Massa

langsung masuk ke halaman markas As-sunnah dan membakar mobil dan motor di tempat parkir persis di depan masjid dan klinik. Para pekerja di dalam klinik kesehatan ketakutan dan tidak berani keluar, begitu juga anak-anak siswa di asrama yang terbangun mengalami ketakutan dan trauma. Untungnya, sebagian besar siswa sedang tidur ketika peristiwa pembakaran tersebut sehingga tidak menimbulkan kepanikan besar. Tidak lama setelah kebakaran polisi berhasil mengamankan area markas As-Sunnah. Menariknya, tidak ada satupun pelaku yang ditangkap oleh kepolisian, dan identitas mereka tidak pernah diekspos ke publik.

Praktik vandalisme seringkali terjadi di wilayah Lombok Nusa Tenggara Barat. Vandalisme merupakan bentuk pengrusakan properti milik seseorang atau kelompok yang dilakukan oleh orang tertentu (Bhati, 2023). Penyerangan terhadap masjid dan markas As-Sunnah merupakan bentuk vandalisme karena mereka merusak dan membakar properti milik kelompok Wahabi. Penyerangan di markas Asunnah mengakibatkan terbakarnya enam buah sepeda motor, dan enam buah mobil yang terparkir di halaman markas. Tidak ada korban jiwa dalam penyerangan tersebut yang diperkirakan dilakukan 300-500 orang lengkap dengan senjata tajam. Pembakaran tepat dilakukan pada jam 2.30 AM dini hari, pada saat orang sedang tertidur pulas. Di dalam markas As-Sunnah terdapat masjid, klinik kesehatan, kantor biro haji dan umrah, lembaga Assunnah Peduli, lembaga pendidikan SD, SMP, SMA Islam Terpadu, Ma'had Ali untuk perempuan, asrama santri, perumahan untuk guru-guru, dan anggota

Wahabi. Setelah beberapa jam kejadian, pihak kepolisian datang mengamankan lokasi kebakaran. Langkah cepat pihak kepolisian berhasil menghentikan laju api sehingga tidak menyentuh asrama santri. Jika seluruh bangunan itu terbakar, maka ribuan santri akan menjadi korban.

Pembakaran markas As-Sunnah menjadi berita nasional dan menarik perhatian pemerintah pusat dan daerah. Menurut Asdaruddin, tokoh agama dan Hamid, tokoh masyarakat bahwa pembakaran markas tersebut merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat terhadap dakwah Wahabi yang seringkali menyalahkan dan menyesatkan praktik beragama masyarakat Muslim lokal melalui ceramah langsung di masjid-masjid mereka, dan juga melalui media sosial YouTube. TGB. Zainul Majdi dalam sebuah wawancara dengan stasiun TV nasional TVONE berpendapat bahwa “tidak ada yang lebih mulia selain mengajak pada kebaikan, maka pendakwah harus bertanggung jawab atas apa yang disampaikan karena dia sedang meminjam podium Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan harus sesuai dengan cara-cara Nabi”. Terkait dengan penghinaan terhadap pengamalan agama di Lombok terutama ziarah makam leluhur menurut Majdi adalah sikap yang kurang arif dan mendatangkan ketegangan. Menurutnya, ini bagian dari pengamalan ajaran Ahlusunnah wal Jamaah (Azwaja), tradisi yang baik yang tumbuh dan berkembang ratusan tahun dan itu diakui di dalam agama Islam. Kasus penyerangan ini adalah respon dan reaksi masyarakat yang sudah cukup lama yang keberatan terhadap konten agama yang disampaikan. Tidak perlu

tradisi ziarah itu diungkit dan dipojokkan, banyak konten yang lebih konstruktif untuk disampaikan”.

Konflik antara Wahabi dengan masyarakat lokal terus mengalami eskalasi yang lebih luas. Tidak cukup dengan penyerangan di markaz As-Sunnah, massa dari berbagai Ormas, santri dari berbagai pondok pesantren, tokoh agama dan tokoh adat menuntut pembubaran Yayasan Asunnah dan cabang-cabangnya di seluruh pulau Lombok. Masyarakat menggelar aksi demo berjilid-jilid yang melibatkan ribuan warga di Lombok Timur dan di Mataram. Aksi awal demo 212 yang hanya menuntut pencabutan izin pembangunan masjid Wahabi di Mamben Daya berlanjut ke demo-demo yang lain termasuk misalnya aksi demo di depan kantor Bupati oleh pengikut tuan guru Ali Batu. Keluarga dan pengikut TGH. Ali Batu melakukan aksi dengan jumlah massa diperkirakan 6000 orang. Sambil berjalan kaki membawa poster dan membaca shalawat, mereka juga menyampaikan beberapa tuntutan, yaitu kasus Mizan Qudsiyah yang menghina makam tuan guru Ali Bata harus diproses. Satriawan, perwakilan keluarga keturunan TGH. Ali Batu menyatakan, sangat terusik dengan dengan ceramah tokoh Wahabi tersebut, dia tidak paham dengan sepak terjang TGH. Ali Batu yang berhasil menyatukan kelompok bangsawan dan mati syahid ketika perang melawan penjajah Bali yang dianggap menzalimi masyarakat Sasak. Juru bicara pada aksi demo juga menyampaikan tuntutan mereka agar Mizan Qudsiyah, pemimpin Wahabi segera diproses karena menyampaikan ceramah yang intoleren, mengeluarkan kata-kata kotor dan

menyesatkan. Bupati Lombok Timur yang menemui massa juga menyampaikan orasi terkait kasus yang muncul. Menurutnya Wahabi harus membaca ulang sejarah TGH. Ali Batu supaya tidak cepat merendahkan tokoh agama yang kharismatik tersebut.

Kasus penyerangan berupa pembakaran masjid Wahabi di Mamben Daya dan Markas Assunnah merupakan respon dari ceramah ustaz Mizan Qudsiyah yang dipotong dan diviralkan melalui media sosial. Tidak hanya masyarakat yang melakukan kekerasan, tokoh Wahabi juga melakukan kekerasan simbolik terhadap simbol-simbol suci yang sangat dihormati oleh masyarakat lokal, yaitu makam keramat para wali. Jadi argumen kami adalah kedua kelompok massa pada dasarnya sama-sama melakukan kekerasan terhadap simbol yang dianggap suci oleh masing-masing. Ziarah makam bagi Wahabi adalah haram, apalagi meminta doa kepada jenazah yang dimakamkan di tempat itu. Persoalannya kelompok Wahabi memaksakan pemahaman dan penafsiran mereka ke masyarakat dengan cara menentang, dan mengkirik secara ekstrim. Dalam praktik ritual ziarah makam sulit untuk dipisahkan bahwa praktik kegamaan masyarakat Sasak antara meminta keberkahan dari makam atau dari Allah. Setiap ritual yang dilakukan menggunakan sesajen yang disertai dengan doa secara Islam. Praktik sinkritisme agama sangat kental dalam tradisi keagamaan masyarakat Sasak, bahkan di beberapa ritual masyarakat Muslim sharing tempat ibadah dengan masyarakat Hindu di Pura Lingsar Lombok Barat (Cederroth, 1975; Harnish, 2022).

Kemaliq di pura Lingsar awalnya dikuasai oleh masyarakat Muslim, di sana terdapat

mata air dan batu-batu yang dipercayai memiliki roh. Ummat Islam selalu bersemedi di tempat suci tersebut, begitu juga orang Hindu (Ribut et al., 2019; Saladin, 2011). Akan tetapi, belakangan ini kemaliq tersebut diambil alih dan didominasi oleh orang Hindu, mereka lebih sering beribadah di sana daripada umat Islam. Menurut ketua adat di lingkungan kemaliq bahwa hadirnya Islam syariah termasuk Wahabi telah mempengaruhi praktik ritual yang dilakukan. Sekarang masyarakat lokal Muslim sangat jarang melakukan ritual di sini, berbeda dengan sebelumnya. Kami selalu dianggap sesat, sirik, dan keluar dari ajaran Islam, kata ketua adat. Saat Covid-19, kami juga tidak pernah lagi mengadakan perang topat, perang yang menjadi simbol kerukunan masyarakat Hindu dan Muslim.

Berkembangnya ajaran takfirisme, bidah, dan sesat oleh kelompok Wahabi menjadi acaman serius bagi masyarakat. Pada saat yang bersamaan, kelompok Wahabi melihat pemurnian tauhid ini sebagai tugas suci dakwah yang harus disampaikan seperti yang dilakukan Nabi Muhammad. Materi dan pendekatan dakwah yang terus mewacanakan pemurnian agama dan penghilangan praktik ritual lokal yang dianggap sesat merupakan sumber-sumber konflik dan perpecahan. Konflik dan kekerasan sulit dihindari ketika Wahabi berbicara atas nama ajaran Islam yang benar, dan yang lain sesat tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ritual kematian berupa "tahlilan" juga misalnya ditentang oleh Wahabi karena adanya jamuan makanan yang dianggap tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tahlilan kematian merupakan ritual yang populer di masyarakat yang

diwarisi dari nenek moyang sejak Islam datang di Lombok. Tradisi ini terus dipelihara oleh masyarakat dalam bentuk peringatan tujuh hari, sembilan hari, 40 hari sampai 100 dan 1000 hari. Tradisi ini mengalami kemunduran sejak masuknya aliran-aliran pemurnian dari organisasi Islam lainnya termasuk dari aliran Wahabi.

Wahabi di satu sisi mulai menarik simpati masyarakat, mereka menawarkan praktik beragama yang sederhana tidak diberatkan dengan campuran praktik budaya dan adat. Kematian misalnya cukup dengan dishalatkan dan memberi bantuan kepada keluarga yang ditinggal, bukan meminta mereka menyediakan makanan atau pesta-pesta yang membutuhkan uang banyak. Meskipun keluarga dekat yang meninggal dan masih mempraktikkan ritual "*begawe mate*" anggota Wahabi tidak akan hadir. Bahkan dalam beberapa kasus anggota Wahabi menentang saudara-saudaranya yang mempraktikkan ritual tersebut sehingga terjadi konflik di internal keluarga yang membawa-bawa nama ajaran mereka.

Wahabi juga aktif membangun masjid sebagai media dakwah. Pembangunan masjid Wahabi disponsori oleh negara Timur Tengah, mereka hanya menyediakan lahan. Mereka memisahkan diri dengan masjid masyarakat yang umum karena adanya perbedaan tata cara shalat. Mereka hanya shalat berjamaah di masjid-masjid Wahabi yang terdekat. Pengikut Wahabi yang tersebar-kemana-mana tidak memiliki akses ke masjid Wahabi yang terdekat, maka itulah alasan lain mereka untuk membangun masjid. Akan tetapi, sangat disayangkan ketika masjid-masjid mereka mendapat respon negatif dari masyarakat,

bahkan menyerang dan membakar masjid mereka. Tempat-tempat suci menjadi hal yang menakutkan berupa serangan antara dua kelompok dalam konteks ini adalah makam suci dan masjid. Konflik Wahabi dengan masyarakat lokal terus mengalami reproduksi dan eskalasi ketika ruang-ruang publik untuk bersatu disalahgunakan untuk berpisah.

Peran Para Tokoh dalam Pusaran Konflik Wahabi dan Kepentingan Mereka

Dalam studi konflik, identifikasi agen-agen konflik sangat penting dilakukan untuk memahami latar belakang, agenda dan kepentingan dari keterlibatan mereka dalam konflik tersebut. Konflik dalam teori Karl Marx disebabkan karena kompetisi antara agen sosial dalam memperebutkan sumber daya yang terbatas. Pertarungan antara kelas terutama dominasi kelompok kelas elit terhadap kelas bawah tidak hanya menimbulkan alienasi bagi kelas pekerja terhadap nilai-nilai dari hasil pekerjaan mereka, tetapi juga diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan simbolik (Rockmore, 2002). Dalam konteks Wahabi dengan masyarakat lokal, konflik yang muncul lebih kompleks karena tidak hanya melibatkan persoalan kecemburuan sosial dalam persaingan ekonomi, juga tentang legitimasi kebenaran, dominasi pendidikan, status sosial, dan otoritas keagamaan. Kontestasi antar organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam dalam perebutan anggota, peran di tempat ibadah seperti masjid, dan ruang kekuasaan termasuk politik praktis lazim terjadi di lapangan ketika menargetkan individu-individu untuk bergabung ke dalam organisasi atau Yayasan mereka.

Jumlah anggota memainkan peran penting atas kelancaran aktivitas keagamaan dan percepatan pertumbuhan ekonomi Ormas. Kepentingan politik juga melatari perebutan massa terutama bagi Ormas yang partisipatif dan terlibat langsung dalam politik praktis.

Setidaknya terdapat dua tipe Ormas Islam di Lombok terkait dengan politik praktis yaitu pertama, Ormas yang terlibat langsung dengan partai politik. Kedua, Ormas yang tidak terlibat langsung, tetapi menjadi pendukung di belakang salah satu partai politik. Di antara Ormas yang terlibat langsung adalah Nahdlatul Wathan, Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah, Yatopa, Marakit Taklimat, dan Nahdlatul Ulama. Meskipun secara aturan organisasi bersikap tidak berafiliasi dengan partai manapun, tetapi fakta di lapangan tokoh-tokoh utama dari Ormas tersebut sangat aktif berkegiatan politik praktis dengan bungkus agama. Bendera-bendera partai politik terpampang di lokasi acara Ormas tersebut. Di lingkungan NW dan NWDI misalnya, setiap acara hari ulang tahun (Hultah) Yayasan pendidikan pertama NWDI ataupun acara besar Ormas lainnya terpasang bendera partai politik di pinggir jalan dan di lokasi acara. Adapun kelompok yang tidak terlibat langsung di politik praktis adalah kelompok Wahabi, Jamaah Tabligh, Ahmadiyah, Hidayatullah, dan LDII. Meskipun tidak terlibat di politik praktis, tetapi Wahabi misalnya memiliki akses ke pemerintah cukup kuat, mereka membangun komunikasi dan melakukan dakwah di masjid-masjid pemerintah. Jamaah Tabligh sedikit berbeda mengambil jalan ekstrim tidak bekerja sama dengan pemerintah dalam arti mengajukan proposal

untuk kegiatan keagamaan mereka. Apa yang mereka lakukan murni swadaya dari anggota Jamaah Tabligh.

Keberadaan ormas-ormas tersebut di masyarakat menciptakan persaingan di antara anggota dan tokoh masing-masing Ormas. Kelompok Wahabi termasuk yang paling ditentang di masyarakat karena pendekatan mereka yang menyerang praktik budaya lokal termasuk tradisi keagamaan yang telah berkembang dari generasi sebelumnya. Akibatnya, Wahabi dihadapkan dengan konflik di berbagai tempat dakwah mereka, meskipun perlahan-lahan pengaruh dakwah Wahabi mulai diakui dan diterima oleh masyarakat. Masjid-masjid mereka menjadi sasaran serangan, selain karena dianggap menyaingi masjid yang ada di lingkungan masyarakat, juga masjidnya dianggap memisahkan diri dari masyarakat. Segragasi sosial ini melahirkan image yang negatif tentang Wahabi, begitu juga sebaliknya Wahabi memandang adanya praktik yang keliru di masyarakat yang keluar dari aqidah Islam.

Kasus pembakaran masjid Wahabi di desa Mamben Daya awalnya hanya melibatkan tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang tinggal di desa Mamben Daya. Koordiantor aksi Asdaruddin menyatakan, hampir semua tokoh agama dan masyarakat keberatan dengan adanya izin pembangunan masjid tersebut. Belum ada izin keluar, masjid mereka sudah berdiri, katanya. Menurutnya, "Wahabi melakukan kebohongan publik dan ini yang kami beratkan dari tokoh-tokoh Mamben Daya. Desa Mamben Daya telah lama menjadi target kelompok Wahabi. Jika Wahabi berhasil membangun masjid, maka pengaruh

Wahabi semakin kuat di masyarakat, dan mereka rencananya akan membangun masjid di Mamben Lauk (Mamben Selatan), dan desa Wanasaba, kata Asdaruddin. Penyebaran inilah yang kami kuatirkan ke depannya dapat merusak persatuan masyarakat. Dia juga mengumpulkan semua tokoh agama dan masyarakat di desa Mamben Daya untuk menyikapi gerakan Wahabi yang dianggap semena-mena tanpa izin dan komunikasi ke tokoh-tokoh. Para tokoh agama dan masyarakat desa Mamben Daya kemudian menandatangani petisi pencabutan izin ke pihak kepala desa. Tanda tangannya ini disebar di media sosial dan mengancam akan melakukan aksi jika izin pembangunan tidak ditanggapi.

Pemberian izin oleh pihak desa menurut Sekdes Mamben Daya merupakan hak konstitusional warga negara. Setelah panitia pembangunan masjid As Syafi'i dari komunitas Wahabi mendapat tanda tangan dari tentangga, pemerintah desa kemudian mengeluarkan izin pembangunan. Dikarenakan oleh tekanan semakin kuat dari masyarakat dan tokoh agama termasuk rencana aksi demo 212 di Masjid Imam As Syafi'i, pihak desa berupaya memediasi mereka, tetapi selalu gagal karena ketidakhadiran salah satu pihak. Kesbangpol Lombok Timur misalnya, sebelum terjadinya aksi demo 212 atas pembangunan gedung masjid Imam As Syafi'i tersebut telah mengundang para tokoh yang terlibat untuk duduk bersama dalam satu meja. Begitu juga aparat keamanan dari kepolisian berupaya membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh agama untuk menggagalkan aksi demo yang diperkirakan akan anarkis dan

mengganggu stabilitas keamanan warga. Gagalnya negosiasi antara kelompok yang bertikai dan tidak adanya surat pencabutan secara tegas dari pihak desa mendorong aksi demo 212. Selain ke lokasi masjid Wahabi, para demonstran juga menuju kantor kepala desa yang berujung pada pembacaan pencabutan izin pembangunan masjid Wahabi.

Perubahan sikap kepala desa karena desakan dari tokoh agama dan masyarakat untuk menghentikan proses pembangunan masjid menjadi bumerang bagi anggota dan tokoh-tokoh Wahabi. Para tokoh dan anggota Wahabi sangat kecewa dengan sikap kepala desa tersebut, yang awalnya sangat mendukung pembangunan masjid Wahabi. Bahkan informasi dari salah satu informan menunjukkan bahwa pihak kepala desa yang mendorong teman-teman Wahabi membangun masjid tersebut, padahal signifikansinya tidak begitu mendesak membangun masjid di daerah ini. Tokoh-tokoh Wahabi sadar bahwa desan Mamben Daya termasuk yang paling sulit ditaklukkan oleh pendakwah Wahabi karena ketaatan masyarakat Mamben Daya pada tokoh agama, tuan guru dan Ormas afiliasi mereka. Jumlah anggota Wahabi sangat kecil di Mamben Daya yakni hanya 60 orang dari ribuan penduduk, kata salah satu anggota Wahabi. Dia juga menyatakan, “kami merasa dibuang oleh kepala desa dan menjadi korban kontestasi politik lokal di desa tersebut”. Kepala desa diberi pilihan oleh demonstran, mendukung Wahabi atau kami turunkan dari posisi kepala desa.

Kepala desa dalam penjelasannya tentu sangat berbeda dari data-data yang lain.

Menurut kepala desa, pencabutan izin dilakukan karena salah prosedur dari pihak Wahabi dalam membangun masjid, tidak ada musyawarah dan dialog dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat lain di desa ini. Inilah yang menjadi masalah besar di sini, katanya. Kepala desa Mamben Daya juga mengungkapkan adanya kepentingan politik dalam kasus ini. Menurut pandangan kepala desa Mamben Daya, aksi demo tersebut bermuatan politik karena menyebut unsur “korupsi” di pemerintahan desa pada orasi mereka, dan keterlibatan dua calon kepala desa yang kalah pada Pilkades sebelumnya juga ikut dalam aksi demonstrasi tersebut. Malahan jabatan saya juga terancam jika tidak mengikuti kemaun pendemo, kata kepala desa.

Pasca peristiwa demonstrasi terhadap pembangunan masjid Wahabi di Mamben Daya dan juga tuntutan penghentian izin menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Tidak hanya tokoh Wahabi yang dapat memetik pelajaran dari kasus ini, tetapi tokoh-tokoh lain termasuk para tuan guru, kepala daerah, dan kepolisian. Kepala desa menyatakan, segregasi sosial yang diciptakan oleh Wahabi mulai berubah, mereka dipaksa untuk hadir di acara-acara keagamaan meskipun tidak sesuai dengan ajaran mereka. Jika tidak hadir, maka konsekuensinya mereka akan dikucilkan di masyarakat. Saya menyaksikan sendiri adanya perubahan di kalangan Wahabi, banyak di antara mereka membaur di acara-acara ritual termasuk kematian yang sebelumnya mereka haramkan, kata kepala desa.

Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Proses Rekonsiliasi

Rekonsiliasi merupakan tahapan yang sangat penting pasca konflik dan kekerasan antara agen-agen sosial. Rekonsiliasi adalah proses untuk memperbaiki hubungan yang rusak, dan mencari titik temu dari persoalan-persoalan yang dipertentangkan (Bar-Tal, 2000; Pankhurst, 1999). Melihat kasus-kasus kekerasan dan konflik yang terjadi di Lombok upaya rekonsiliasi secara utuh dan tuntas sangat jarang ditemukan. Konflik dan kekerasan seringkali berakhir dengan apa adanya tanpa ada kesepakatan damai. Dengan demikian konflik dan kekerasan tidak berhenti pada satu titik, tetapi justru mengalami eskalasi yang berkepanjangan tanpa akhir.

Konflik internal Nahdlatul Wathan misalnya membutuhkan waktu 20 tahun untuk mencapai kata “islah” atau rekonsiliasi. Itupun masih saja terdengar adanya gesekan dan pertentangan antara kedua kubu pasca rekonsiliasi. Konflik Ahmadiyah dengan masyarakat lokal di Lombok misalnya tidak pernah muncul istilah rekonsiliasi, konflik dibiarkan begitu saja dan suatu saat akan terjadi ledakan kembali menimpa kelompok Ahmadiyah. Mereka aman untuk sementara karena mengungsi di lokasi perkotaan, tetapi mereka masih rentan dengan kekerasan karena rekonsiliasi secara transparan dan jangka panjang belum pernah dilakukan. Aktor-aktor yang terlibat penyerangan terhadap Ahmadiyah tidak pernah meminta maaf, sebaliknya mereka mengancam Ahmadiyah jika kembali ke kampung halaman mereka sendiri. Rumah dan tanah mereka terpaksa dijual ke masyarakat dengan harga murah.

Konflik Wahabi dengan masyarakat lokal juga terlihat kurangnya upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Ini terlihat dari menyebarnya konflik Wahabi dari satu desa ke desa yang lain. Penyerangan masjid Wahabi di Mamben bukanlah kejadian pertama, akan tetapi peristiwa penyerangan yang serupa terjadi di beberapa desa di Lombok khususnya di Lombok Timur. Pembakaran masjid Wahabi di desa Kabar Sakra, desa Pringga Sela, desa Suralaga, desa Dasan Borok, dan masjid Wahabi di desa Kota Raja. Keterlibatan pemerintah dalam jangka pendek cukup membantu meredakan konflik, tetapi untuk jangka panjang belum muncul kesadaran dari kedua belah pihak untuk saling menghormati perbedaan pandangan keagamaan dan hidup berdampingan secara damai dan harmonis. Potensi konflik dan kekerasan pada waktu-waktu tertentu cukup besar karena kesadaran yang tidak dibangun oleh para anggota dan tokoh-tokoh dari kedua belah pihak, sebaliknya terus memupuk keyakinan bahwa pandangan mereka yang paling benar dan menyalahkan yang lain.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan kasus penyerangan masjid As-Syafi'i dan markaz As-Sunnah di Lombok Timur mendorong pemerintah daerah untuk memediasi konflik dengan mengumpulkan pimpinan Ormas. Bupati Lombok Timur mengadakan pertemuan di kantor Bupati pada 03 Januari 2022 yang dihadiri oleh ketua FKUB Lombok Timur, PD NWDI, PD NW, Ketua MUI Lombok Timur, Ketua PCS NU Lotim, Ketua Yayasan Maraqitta'limat, ketua PC Muhammadiyah Lotim, dan pimpinan Ponpes As-Sunnah. Hasil pertemuan ini melahirkan tujuh buah

kesepakatan, yaitu meningkatkan kerukunan umat beragama, mengutamakan musyawarah dan mufakat, menyampaikan dakwah bil hikmah wa mau'izotil hasanah, menjunjung tinggi nilai silaturahmi, ikut berpartisipasi dalam mengawasi, menolak dan mengutuk tindakan intoleransi, radikalisme maupun teorisme, menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pendiiran rumah ibadah, lembaga pendidikan, maupun Lembaga yang terkait dengan sosial keagamaan dan menyegakan penyelesaian melalui jalur hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan, serta mendukung Pemda Lombok Timur dalam rangka menciptakan situasi rukun dan damai di wilayah kabupaten Lombok Timur yang adil, sejahtera dan aman tentunya.

Selain kesepakatan di atas Pemda Lombok Timur juga membuat keputusan untuk membeli tanah lokasi pembangunan masjid As-Syafi'i. Seluruh tanahnya dibeli Pemda dan statusnya milik Pemda Lombok Timur. Keputusan ini sepertinya memuaskan kedua belah pihak baik yang pro dan kontra. Anggota dan tokoh Wahabi bahagia dengan keputusan pemerintah karena tidak merugikan mereka, sementara kelompok yang kontra melihat keputusan itu sebagai langkah untuk menghentikan pembangunan masjid sehingga menimbulkan rasa aman di masyarakat. Meskipun keputusan Pemda Lotim membeli tanah sebagai win-win solution, tetapi langkah pemerintah itu berpotensi mematikan dakwah Wahabi. Mereka kalah secara negosiasi karena tanah bangunan masjid tidak lagi dalam penguasaan mereka. Mereka tidak dapat lagi melanjutkan usaha pembangunan masjid

ke depannya, kemungkinan bisa saja nuansa sosial dan politik berubah.

SIMPULAN

Penyerangan terhadap masjid As-Syafi'i milik aliran Wahabi di desa Mamben Daya sejak Oktober 2021-Januari 2022 merupakan akumulasi dari persoalan yang terjadi di lapangan terutama di arena ruang dakwah. Diskursus purifikasi agama dan anti bidah yang dikembangkan oleh Wahabi yang berlawanan dengan keyakinan dan tradisi keagamaan masyarakat lokal menjadi faktor utama perlawanan dan resistensi masyarakat lokal terhadap pembangunan masjid Wahabi. Akan tetapi menjadi ironi ketika pembangunan masjid dihalangi, dilarang bahkan dibakar oleh Ormas Islam yang notabene masih dalam satu internal keagamaan Islam. Keberadaan masjid Wahabi hanya dilihat dari sisi negatif karena menyaingi masjid yang lain, dan pengelolaannya diklaim eksklusif yang seringkali menciptakan segregasi sosial. Masyarakat dan pemerintah daerah tidak sadar bahwa keberadaan masjid Wahabi dapat menjadi solusi alternatif ketika perbedaan pemahaman dan penafsiran tentang teks agama mengalami *deadlock* di lapangan. Meski terlihat eksklusif yang pengelolaannya atas nama Wahabi, kenyataannya mereka terbuka dengan siapapun yang shalat dan ikut kajian mereka.

Konflik Wahabi yang locusnya pada penentangan izin pembangunan masjid As-Syafi'i melebar setelah viral potongan video ceramah tokoh Wahabi Ustaz Mizan Qudsiyah yang menghina makam leluhur dan para wali karena terlalu dikultuskan. Potongan ceramah ini menimbulkan eskalasi konflik

dan kekerasan, massa membakar masjid As-Syafi'i dan juga markaz As-Sunnah. Demonstrasi berjilid-jilid terjadi akibat hinaan di video tersebut di Lombok Timur dan Mataram yang menuntut kasus Mizan supaya diadili dan lembaga pendidikan mereka ditutup. Jika dilihat dari kasus yang ada kedua kubu melakukan kekerasan baik dari kelompok Wahabi maupun masyarakat lokal. Kekerasan oleh kelompok Wahabi lebih bersifat simbolik karena menghina makam dan tradisi Muslim lokal yang berkembang, dan pada saat yang bersamaan masyarakat melakukan kekerasan fisik karena jumlah massa mereka yang lebih besar.

Dalam kasus konflik Wahabi ini melibatkan banyak aktor dengan kepentingan yang beragam. Tokoh-tokoh agama, kelompok adat dan tokoh politik berkontribusi besar atas eskalasi konflik dan kekerasan yang terjadi. Politik lokal juga berpengaruh ketika para calon di Pilkadaes yang gagal ikut dalam aksi penentangan kelompok Wahabi dan kebijakan kepala desa terpilih. Mereka bahkan menargetkan kepala desa turun dari jabatannya jika tidak bisa menyelesaikan kasus izin pembangunan masjid dan mengancam membuka kasus korupsi di kantor desa. Pemerintah desa dan daerah berupaya memediasi kedua kelompok tersebut dengan mempertemukan dan membuat kesepakatan termasuk membeli lahan masjid milik Wahabi dengan tujuan tidak ada lagi pembangunan dan pihak Wahabi tidak dirugikan. Kebijakan Pemda ini secara tidak langsung mendisempower kelompok Wahabi dan menutup akses dakwah mereka ke depannya.

Ucapan Terima Kasih

Pendanaan penelitian ini didukung oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM) Kepada Masyarakat Universitas Mataram.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, K. (2022). Navigating Against Salafi-Wahabi Expansion in Malaysia: The Role of State and Society. *Studia Islamika*, 29(1). <https://doi.org/10.36712/sdi.v29i1.25213>
- Alfandi, M. (2013). Prasangka: Potensi Pemicu Konflik Internal Umat Islam. *Walisongo*, 21(1), 113-140. <http://mta-online.com/v2/sekilas-profil/>
- Alsaif, T. (2013). Relationship between state and religion in Saudi Arabia: The role of Wahabism in governance. *Contemporary Arab Affairs*, 6(3). <https://doi.org/10.1080/17550912.2013.822721>
- Anwar, H. (2016). Politik Luar Negeri Arab Saudi dan Ajaran Salafi-Wahabi di Indonesia. *Jisiera: The Journal of Islamic Studies and International Relations*, 1(August).
- Aqil, M. (2020). Konflik Kepemimpinan Jamaah Tabligh Di Kota Padang, Sumatera Barat. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2(1), 32-44. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i1.85>
- Ardiansah, A. (2018). Legalitas Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1). <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1434>
- Aritonang, A. (2020). Bangkitnya Islam Radikal dan Nasionalisme: Studi tentang Gerakan Islam Wahabi. *Jurnal EFATA: Jurnal Teologi Dan Pelayanan*, 6(2). <https://doi.org/10.47543/efata.v6i2.29>
- Asif, M. (2018). Indonesian Traditional Ulama Notions Against Wahhabism: A Study of Abi al-Faḍal al-Senoriy's Thought. *Walisongo*:

- Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 26(2). <https://doi.org/10.21580/ws.26.2.2841>
- Barkley, L. (2012). Has Wahhabi Islam played a part in the rise of global terrorism? *Has Wahhabi Islam Played a Part in the Rise of Global Terrorism*.
- Bar-Tal, D. (2000). From Intractable Conflict Through Conflict Resolution to Reconciliation: Psychological Analysis. In *Political Psychology* (Vol. 21, Issue 2).
- Benthall, J. (2016). Puripetal force in the charitable field. *Asian Ethnology*, 75(1). <https://doi.org/10.18874/ae.75.1.02>
- Bhati, A. (2023). Tourism research and tackling vandalism: Shifting the approach. *Tourism and Hospitality Research*, 23(2). <https://doi.org/10.1177/14673584221100707>
- Cederroth, S. (1975). Symbols of a Sasak Community in Northern Lombok. *Ethnos*, 40(1-4), 169-184. <https://doi.org/10.1080/00141844.1975.9981101>
- Debataraja, L.-. (2022). Penentuan Persyaratan Dukungan Masyarakat di Lingkungan Pendirian Rumah Ibadah Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. *EKSEKUSI*, 4(2). <https://doi.org/10.24014/je.v4i2.14174>
- Enjavinezhad, M., & Paramasivam, S. (2020). The Role of Wahhabi Discourse in the Syrian Uprising. *Shanlax International Journal of Arts, Science and Humanities*, 7(4). <https://doi.org/10.34293/sijash.v7i4.2292>
- Fatmawatun. (2019). Kritik Terhadap Teologi Wahabiyyah Di Indonesia Dalam Pemikiran Said Aqil Siradj. In *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.
- Hamdi, S. (2019). De-Kulturalisasi Islam dan Konflik Sosial dalam Dakwah Wahabi di Indonesia. *Jurnal Kawistara*, 9(2), 164. <https://doi.org/10.22146/kawistara.40397>
- Hamdi, S., Mulyadi, F., & Suwanto, S. (2021). De-Radikalisasi Islam, Khilafah dan Pendidikan Pancasila di Komunitas Wahabisme di Indonesia. *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 4(2). <https://doi.org/10.20414/sangkep.v4i2.3371>
- Harnish, D. (2022). "Like King and Queen, Like Balinese and Sasak." *Ethnologies*, 23(1), 63. <https://doi.org/10.7202/1087917ar>
- Hogarth, D. G. (1925). Wahabism and British Interests. *Journal of the British Institute of International Affairs*, 4(2). <https://doi.org/10.2307/3014617>
- Kingsley, J., & Law School, M. (2010). *Tuan Guru, community and conflict in Lombok, Indonesia*.
- Kusumah, E. A. (2020). Wahabi: Politik Agama dan Hasrat Kekuasaan Di Indonesia. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 4, 1(September 2016).
- Ludji, J. F., Sagala, R. W., & Nainggolan, B. D. (2023). Konflik dan Resolusi Konflik Pembangunan Gedung Ibadah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) Lasiana Kota Kupang. *Immanuel: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 4(1). <https://doi.org/10.46305/im.v4i1.167>
- Madali, E. (2015). Sikap Pengikut Salafi Wahabi di Indonesia dalam Masalah Khilafiyah. *Doisertasi*.
- Madali, E. (2020). Islamic Law's View on Wahhabi Salafi Intolerance. *Nurani Hukum*.
- Marrison, G. E. (1997). The literature of Lombok: Sasak, Balinese, and Javanese. *Indonesia and the Malay World*, 25(73), 221-234. <https://doi.org/10.1080/13639819708729901>
- Moussalli, A. (2009). Wahhabism, Salafism and Islamism: Who Is The Enemy? In *Conflicts Forum* (Issue January).
- Muhtadi, K. (2015). Deradikalisasi Politik Wahabi-Syi'ah Dalam Konteks Madzhab Tafsir KeIndonesiaan. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 1(02). <https://doi.org/10.32699/syariati.v1i02.1113>
- Muhyidin, M., Triyono, T., & Ardani, M. N. (2022). Pioneer Manuscript in Refuting Wahhabism: The Perspective of Kiai Dimiyati bin Abdul

- Karim as-Surakarta as a Basis for Islamic Moderation. *Journal of Maritime Studies and National Integration*, 6(1). <https://doi.org/10.14710/jmsni.v6i1.14425>
- Nashir, H. (2008). Purifikasi Islam dalam Gerakan Padri di Minangkabau. *Unisia*, 31(69). <https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss69.art1>
- Oliver, H. J. (2002). The 'Wahhabi' Myth Dispelling Prevalent Fallacies and the Fictitious Link With Bin Laden. *The 'Wahhabi' Myth Dispelling Prevalent Fallacies and the Fictitious Link With Bin Laden*.
- Pankhurst, D. (1999). Issues of justice and reconciliation in complex political emergencies: Conceptualising reconciliation, justice and peace. *Third World Quarterly*, 20(1), 239–256. <https://doi.org/10.1080/01436599914027>
- Ribut, G. A. S. P., Triguna, I. B. G. Y., & Suija, I. W. (2019). Didactic strategy of wetu telu cultural heritage on sasak tribe. *International Journal of Linguistics, Literature and Culture*, 5(3), 9–17. <https://doi.org/10.21744/ijllc.v5n3.625>
- Ridho, M. (2017). *Inter-Religious Relationship Between Hindus and Muslims in Lombok*. www.sekty.cz/
- Ridwan. (2021). Salafisme di Papua, Indonesia: Studi Tentang Kelompok Salafi-Wahabi Ja'far Umar Thalib di Kota Jayapura Kabupaten Keerom. *Jurnal Islam Nusantara*, 2(2).
- Rockmore, T. (2002). *Marx after Marxism: the philosophy of Karl Marx*. Blackwell Publishers.
- Sahasrad, H., Maksum, A., Chaidar, A., & Ansari, T. S. (2020). Indonesian terrorism: Wahabism and the 'imagined caliphate.' *Journal of Social, Political, and Economic Studies*, 45(1–2).
- Said, M. (2019). Dinamika Wahabisme di Lombok Timur: Problem Identitas, Kesalehan dan Kebangsaan. *FIKRAH*, 7(1). <https://doi.org/10.21043/fikrah.v7i1.5022>
- Saladin, B. (2011). Wetu Telu, Suatu Bentuk Keberagaman: Pendidikan Pembebasan Berbudaya Masyarakat Lombok. *KARSA: Vol. IX No.1 April*.
- Suprpto. (2015). Religious leaders and peace building: The roles of Tuan Guru and Pedanda in conflict resolution in Lombok - Indonesia. *Al-Jami'ah*, 53(1), 225–250. <https://doi.org/10.14421/ajis.2015.531.225-250>
- Suryawati, N., & Syaputri, M. D. (2022). Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3). <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.433-446>
- Wahab, A. J., & Fakhrudin, F. (2019). Menakar Efektivitas Skb Tentang Ahmadiyah: Sudi Kasus Konflik Ahmadiyah Di Desa Gereneng Lombok Timur. *Harmoni*, 18(1). <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i1.356>
- Wijayanto, W. S. (2021). Resolusi Konflik Pembangunan Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari Semarang. *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja*, 5(1). <https://doi.org/10.37368/ja.v5i1.235>
- Williams, R. J. (2017). Salafism, Wahhabism, and the Definition of Sunni Islam. *Honors Program: Student Scholarship & Creative. Augustana College*.
- Zuhdi, M. H. (2018). Wetu Telu in Bayan Lombok: Dialectic of Islam and Local Culture. *Kawalu: Journal of Local Culture*, 5(2), 1. <https://doi.org/10.32678/kawalu.v5i2.1879>